

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, praktek *good governance* yang diukur dengan indikator Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi dan Penegakan Hukum belum optimal dilaksanakan untuk keempat indikator ini. Dilihat dari segi:

##### ➤ Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas Di Kecamatan Borong yang sudah berjalan dengan baik yakni adanya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum dengan cara mengukur pencapaian program berdasarkan rancangan kegiatan anggaran (RKA). Yang belum berjalan dengan baik adalah perlakuan petugas dalam memberikan layanan dan kurangnya kompetensi petugas dalam memberikan layanan.

##### ➤ Transparansi

Penerapan prinsip transparansi yang sudah berjalan dengan baik adalah standar pelayanannya sudah sesuai dengan SOP. Yang belum berjalan dengan baik kurangnya keterbukaan informasi yang disampaikan oleh petugas kurang informatif, prosedur layanan dan persyaratan belum ada di papan pengumuman yang ditempelkan dirungan pelayanan sehingga masyarakat kurang mengetahui jenis pelayanan apa yang disediakan. Kemudahan akses dokumen persyaratan belum bisa diakses melalui internet/ media sosial.

##### ➤ Demokrasi

Penerapan prinsip demokrasi yang sudah berjalan dengan baik adalah aparatur Kecamatan Borong menerapkan prinsip demokrasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya dengan baik dimana mereka selalu berusaha mendengar, memilah, memilih dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan

berpegang kepada kepentingan masyarakat serta selalu merespon apabila terjadi keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik setiap bulan diadakan briefing. Yang belum berjalan dengan baik aparatur sering kali bersifat diskriminatif.

➤ Aturan Hukum

Penerapan prinsip aturan hukum yang sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas sudah melalui tahapan Desa, RT/RW dan Kelurahan tetapi belum dijabarkan secara ketat

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran bahwa implementasi prinsip *good governance* dalam pelayanan administratif di Kantor Kecamatan Borong sebaiknya Pemerintah mesti meningkatkan prinsip-prinsip *good governance* Akuntabilitas, Transparansi, Demokrasi dan Aturan Hukum sebagai berikut:

1. Dari aspek akuntabilitas perlu peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, baik pelatihan teknis maupun pelatihan sikap melayani.
2. Dari aspek transparansi perlu diperjelas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
3. Dari aspek demokrasi perlu dihindari sikap diskriminatif dan perlu memberika pelayanan yang sama kepada siapapun yang membutuhkan layanan.
4. Dari aspek penegak hukum, supaya prosedur pelayanan semakin dipertegas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andrianto, Nico.2007. *Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Diktat Birokrasi Dan Good governance Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Tahun 2013.
- Dwiyanto Agus. 2012. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, UGM Press. Anggota IKAPI.
- Dwiyanto Agus. 2014. *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*, UGM Press. Anggota IKAPI.
- Hardiyansah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Bina Media. IAN & BPKP. *Pelayanan Publik*.
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga
- Karol Teovani Lodon. *Praktek Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan Kota Batam*. Administrasi Negara Putra Batam.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Moleong Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Amirul Haq Muis,(2014). *Analisis Implementasi Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus di Kecamatan Panakukang Kota Makasar)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Hasandin.

Sadjijono. 2007. Fungsi kepolisian Dalam Pelayanan Good governance.

Laksbang.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B. Bandung: Alfabeta.

Yuanida, Meilani (2010). Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perpres no 81 tahun 2010 tentang grand desaign reformasi birokrasi

WEBSITE:

<https://repository.unikom.ac.id/51314/1/1.neneng-siti-maryam-mewujudkan-good-governance-edited.pdf>